

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tema tentang Studi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Hilisalo'o Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan memfokuskan bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara baik, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Hilisalo'o Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan. Desa Hilisalo'o merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan, Desa yang merupakan bagian dari desa Hilimbowo Idanotae dulunya yang kini terbagi 3 pemekaran yaitu Desa Hilimbowo Idanotae, Desa Buhawa dan Desa Hilisalo'o. Menurut (Maryunani, 2008): "BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa".

Pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk dari komunitas kecil, yang merupakan suatu kelompok hidup kecil yang menetap dalam suatu wilayah yang tetap. Desa di Indonesia mempunyai pola perkampungan yang mengelompok padat dan penduduknya menetap sepanjang musim terutama desa

dengan sistem pertanian menetap. Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (Eki Janrizal, 2019:1)

Pembentukan BUMDes merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi terhadap pembangunan desa, terutama dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi

oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan kehadiran BUMDes, pemerintah desa beserta masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat menjadi lebih baik.

Desa Hilisalo'o, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan merupakan Mayoritas (81%) masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan rata-rata kepemilikan lahan mencapai 1,5 Ha, dengan komoditi pertanian yang dihasilkan berupa padi, jagung, karet, pisang, kapulaga. Pertanian di desa ini rata-rata lahan teknis yang dapat dipergunakan untuk bercocok tanam sepanjang tahun. Sedangkan sisanya adalah sebagai pedagang dan tenaga honorer.

Sebelum dibentuknya BUMDes Hilisalo'o, masyarakat lebih tertarik bekerja di luar kota dan di luar daerah, hal tersebut dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengelolah

potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Begitu pula dengan petani yang hanya mengandalkan hasil pertaniannya saja. Dan untuk para pedagang dalam mengembangkan usahanya para pedagang meminjam modal di koperasi, atau bank dengan bunga yang lumayan tinggi. Sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak pula mendapatkan penghasilan tambahan dikarenakan bunga yang terlalu tinggi. Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat, pemerintah Desa tepatnya di Desa Hilisalo'o, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Tahun 2017 yang merupakan salah satu program andalan yang dapat meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai pendekatan baru dalam rangka meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Adapun program, sarana dan prasarana yang disediakan oleh BUMDes Hilisalo'o yaitu adanya mobil angkutan yang dapat dipakai masyarakat dalam keperluan tertentu. Adanya hasil temuan yang dikemukakan diatas dari BUMDes Hilisalo'o sehingga perlu diketahui pengembangan apa saja yang di lakukan oleh BUMDes di Desa Hilisalo'o dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Tak lepas dari pengaruh pemimpin desa dalam memberikan arah tujuan BUMDes yang dinilai belum sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDes Hilisalo'o. Perlu adanya sinergritas dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya BUMDes dengan arahan yang diberikan oleh pemimpin desa. Peningkatan kualitas yang diperlukan dalam BUMDes Desa Hilisalo'o sangatlah penting, dikarenakan kondisi lingkungan pedesaan yang diharuskan mandiri dan berdaya

guna dalam beraktivitas agar mampu bersaing dengan desa lainnya. Program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes Hilisalo'o belum memberikan dampak yang signifikan kepada BUMDes sendiri maupun masyarakat, dilihat dari program yang memberikan dampak besar kepada BUMDes hilisalo'o yaitu mobil angkutan. Implikasi kepada masyarakat pun masih belum memberikan dampak yang tepat dilihat dari antusias yang belum memberikan ketertarikan sendiri kepada masyarakat. Peneliti merasa perlu adanya analisis yang mendalam untuk mendeskripsikan bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan oleh Hilisalo'o melalui pendekatan teori sesuai dengan bidang ilmu peneliti yaitu Ilmu Administrasi Publik.

Berdasarkan uraian diatas mengenai latar belakang permasalahan yang terkait dengan BUMDes di Desa Hilisalo'o sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "Studi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Desa Hilisalo'o, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pola pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Hilisalo'o?
2. Bagaimana pengembangan program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hilisalo'o Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Hilisalo'o.
- b. Untuk mengetahui pengembangan program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hilisalo'o Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan wawasan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pelayanan publik didalam pemerintahan desa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi untuk memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nomensen secara umum dan program studi Administrasi Publik secara khusus terkait konsep Badan Usaha Milik Desa dalam perannya mensejahterakan Masyarakat.

3. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan khususnya dalam memberikan manfaat serta kontribusi untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang melibatkan masyarakat guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya mengembangkan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan rumusan di atas maka dalam bagian ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.

2.1 Badan Usaha Milik Desa

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa, yang biasa disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Definisi BUMDes Menurut La Suhu., M. Djae, dan Sosoda (2020 : 1-7) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah wadah yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pondasi perekonomian desa yang difungsikan sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain dari pada itu Badan Usaha Milik Desa yakni suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Maksud dan tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Abdul Rohman (Nining Asniar Ridzal 2020 : 1-106), antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Adapun Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain:

1. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat.
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa serta membuka lapangan pekerjaan.

Terdapat enam unsur atau prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain meliputi Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel, Sustainabel. (Bakri La Suhu, 2020 : 1-7), antara lain:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.1.3 Pola Pengelolaan (manajemen)

Dalam menjalankan sebuah organisasi tentu harus adanya manajemen yang baik agar strategi tersebut dapat dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan organisasi yang mengatur, mengurus jalannya organisasi dengan kerjasama antara pimpinan organisasi dan dibantu anggota pengurus organisasi. Menurut George R.Terry (Rahmawati Sururama 2020 : 1-108), mengatakan bahwa:

“manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan fungsi dari setiap pemimpin yang menggerakkan organisasi dengan kerjasama dengan anggota pengurus organisasi, dan memanfaatkan sumber daya manusia yaitu masyarakat, dan sumber daya alam yang berupa potensi yang ada dilingkungan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Di dalam aktivitas manajemen menurut George R. Terry, manajemen ada empat fungsi yaitu : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan tindakan awal dari pelaksanaan manajemen yang baik pada setiap organisasi. Perencanaan adalah kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Dalam membuat perencanaan yang baik, harus mampu melihat jauh ke depan untuk tindakan yang akan kita lakukan, ini berarti kita telah memperkecil resiko yang mungkin timbul baik resiko kekeliruan maupun resiko kemungkinan kegagalan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan di tempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan organisasi.

Dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dan fakta yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan untuk

masa yang akan datang yang mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas dan fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut George R. Terry dalam Rahmawati Sururama, Kegiatan-kegiatan pengorganisasian, meliputi:

- 1). Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan.
- 2). Memilih dan menempatkan anggota dalam bidang yang sesuai.
- 3). Menyesuaikan wewenang dan tugas bagi setiap anggota.

Organisasi dapat diartikan sebagai interaksi antara orang-orang yang ada dalam suatu wadah untuk melakukan sesuatu atau berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian dapat diketahui indikator adanya suatu organisasi adalah ada orang-orang yang bekerja sama, ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan bersama atau terkoordinir, dan ada tujuan bersama yang ingin dicapai.

c. Penggerakan (Actuating)

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan megusahakan agar semua anggota melakukan tugas dan kewajibannya. Para anggota sesuai dengan keahlian dan proporsinya melaksanakan rencana dalam aktivitas konkrit yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, saling memberi motivasi, melaksanakan perintah dan instruksi serta mengadakan supervise dengan meningkatkan sikap dan moral setiap karyawan.

Menurut George R. Terry dalam Rahmawati Sururama, penggerakan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Kegiatan dalam pengarahan seorang manajer kepada anggotanya, meliputi:

- 1). Melakukan partisipasi terhadap keputusan, tindakan dan perbuatan.
- 2). Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
- 3). Memotivasi anggota.
- 4). Berkomunikasi secara efektif

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan (controlling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah

satu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mencapai hasil yang dikehendaki. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan organisasi.

2.1.4 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.2 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hilisalo'o Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan

Pengembangan merupakan rangkaian penataan dan penyempurnaan yang dilakukan secara berencana guna memecahkan masalah yang timbul. Pengembangan organisasi perlu ditingkatkan dengan berbagai teori, proses, dan aktivitas, yang semua itu ditujukan pada sasaran untuk memperbaiki kondisi setiap organisasi. Menurut Iskandar Wiryokusumo (Iskandar 2021 : 1-11), menyatakan bahwa:

Pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya, sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesame, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

2.2.1. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Klasifikasi jenis usaha BUMDes menurut Permendesa No. 4 tahun 2015 menguraikan terdapat empat klasifikasi jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), antara lain:

- a. BUMDes *Serving* adalah usaha sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Usaha ini bersifat usaha ekonomi pelayanan publik yang sifatnya sosial namun bernuansa bisnis kepada masyarakat meskipun kurang memberikan keuntungan secara maksimal. Contoh dari jenis usaha ini misalnya pengelolaan air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna.
- b. BUMDes *Renting* adalah usaha penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh

Pendapatan Asli Desa. Jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan dalam kelompok usaha ini seperti penyewaan alat transportasi, penyewaan traktor, penyewaan perkakas pesta, penyewaan gedung, penyewaan ruko/kios, penyewaan tanah milik desa yang sudah diserahkan ke BUM Desa sebagai Penyertaan Modal Desa.

- c. BUMDes *Brokering* adalah usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. BUM Desa dapat berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dll dari masyarakat, agar mereka tidak kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.
- d. BUMDes *Trading* adalah usaha berproduksi atau berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak Desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal Desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Hyman (Nikmah Sohalita, 2020 : 1-83) mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan obyek studi ekonomika kesejahteraan, yang merupakan analisis normatif interaksi ekonomi yang ingin mencari kondisi bagi pemanfaatan sumberdaya secara efisiensi. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kebahagiaan jangka panjang ataupun terwujudnya harapan setiap kelompok maupun individu dalam setiap kegiatan mencapai kebutuhan sehari-hari serta diperoleh nya keadilan ekonomi yang merata.

Secara umum Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Dapat diartikan bahwa yang dimaksud

dengan orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidup yang dijalani aman dan tenang baik secara lahir maupun batin. Namun keadaan sejahtera bersifat tidak tetap, dapat berubah setiap saat baik dalam waktu cepat atau lambat.

Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan yang kita rasakan, memiliki anak yang berbakti, dan lain sebagainya.

Penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat itu sendiri adalah kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, serta berusaha untuk mencapai kondisi tersebut sesuai dengan kemampuan masyarakat.

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera, yaitu: anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit atau PUS

(Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern. Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

1. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

(a) Tinggi (Rp.>5.000.000)

(b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)

(c) Rendah (< Rp.1.000.000)

2. Pola konsumsi pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

3. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukumhukum dan norma-norma yang berlaku jiwa patriotisme dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia antar Negara adalah Human Deveelopment Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah) serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita). Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera meliputi pangan, sandang, dan papan.
5. Perumahan Masyarakat Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang dianggap sejahtera adalah luas

lantainya lebih dari 10 meter dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri. Menurut konsep BKKBN dalam Rosni (2017) ada lima tingkat kesejahteraan dalam perkembangan masyarakat desa, yaitu:

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS). Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs).
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8 indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 2 indikator tahapan KS III Plus.

c. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 pasal 3 Tahun 2009, yaitu:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun) dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Saniyah (2019) Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab. Pesisir Barat).	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Variabel X BUMDes Variabel Y yaitu kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Sukaraja Ulu Krui. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu	Variabel Y Kesejahteraan Masyarakat Variabel X BUMDes metode penelitian.	Judul penelitian dan lokasi penelitian

			seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes Kluwong itu sendiri.		
2.	Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani (2019) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara.	Jenis penelitian yaitu kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan Peranan BUMDES Tibubeneng sudah terlaksana, strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan unit usaha. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubeneng sehingga mengurangi tingkat pengangguran.	Variabel Y Kesejahteraan Masyarakat Variabel X BUMDes metode penelitian.	Judul penelitian dan lokasi penelitian.
3.	Elma Lazuardiah (2020) Peran Badan Usaha	Jenis penelitian yang digunakan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Peran BUMDes	Variabel Y Kesejahteraan	Judul penelitian dan lokasi penelitian

<p>Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur).</p>	<p>penelitian kualitatif Variabel X BUMDes Variabel Y meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>sebagai sumber sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah luar biasa manfaatnya sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong Pendapatan Asli Desa (PADes).</p>	<p>Masyarakat Variabel X BUMDes metode penelitian.</p>	<p>Variabel Y fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
--	--	--	--	---

2.4 Kerangka Berpikir



Dari kerangka berpikir diatas, Bumdes merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih

baik. Bumdes ini dikelola dengan kepentingan bersama, kemudian usaha milik desa ini sebagai sumber usaha di masyarakat desa. Bumdes dapat menggali potensi desa menjadi produk unggulan yang dikembangkan di desa tersebut dan menjadi alternatif dalam menggerakkan roda perekonomian desa. Setelah adanya BUMDes mulai ada perubahan, pengembangan BUMDes di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat, adapun dari beberapa masyarakat yang pendapatannya berasal dari pertanian akan terbantu, ditambah pemerintah desa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan usaha tani, dengan demikian kondisi ekonomi meningkat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, karena salah satu indikator kesejahteraan adalah pendapatan yang semakin meningkat.

Dengan terbentuknya BUMDes di desa-desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat. BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya peran BUMDes guna supaya dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa setempat untuk lebih efektif, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.

2.5 Definisi Konseptual

1. Definisi Konseptual

a. BUMDes, Masyarakat dan Sumber Daya Ekonomi Desa

Tiga komponen ini didefinisikan sebagai berikut di mana BUMDes sebagai wadah atau media untuk mengelola sumberdaya Ekonomi desa untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan BUMDes berdasarkan partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya ekonomi Desa.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Oleh karena itu, melalui Badan Usaha Milik Desa melakukan upaya-upaya untuk memberikan “daya” kepada masyarakat agar bisa mandiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.

c. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan serta evaluasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyidikan yang sistimatis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistimatis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Sesuai dengan pendapat "Cresswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan".

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif, karena penelitian ini secara perlahan-lahan memaknai fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, menggolongkan dan mengklarifikasi objek penelitian.

Maka berdasarkan uraian dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahawa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini akan didapatkan gambaran secara terarah dan sistematis, faktual dan akurat tentang faktor-faktor, sifat dan gejala yang diamati, sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat terealisasi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data langsung di lokasi penelitian yaitu berlokasi di Desa Hilisalo'o, Kecamatan Idanotae, kabupaten Nias Selatan. Penulis mengambil Instansi tersebut dikarenakan ketertarikan penulis melihat bagaimana peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini, mulai dari januari hingga sampai dengan Juni 2022, yang meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengolahan dan sampai penyusunan laporan.

3.2. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Kegiatan (2022)																													
		Jan		Februari				Maret					April			Mei				Juni				Juli				Agustus			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																												
2.	Acc Judul			■	■	■	■	■																							
3.	Persetujuan Pembimbing			■	■	■	■	■																							
4.	Bahan Literatur							■	■	■	■	■																			
5.	Penyusunan Proposal								■	■	■	■																			
6.	Bimbingan Proposal												■	■																	
7.	Seminar Proposal															■	■	■	■												
8.	Revisi															■	■	■	■												

3.3 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama saat pengumpulan data adalah pemilihan informan. Pengertian informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti ditempat penelitian diantaranya :

1. Informan Kunci, merupakan yang terlibat langsung dalam keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (ketua BUMDes sekretaris dan bendahara).
2. Informan Tambahan, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Kepala Desa).
3. Informan Utama, merupakan masyarakat yang ikut bergabung dalam BUMDes, masyarakat yang sudah pernah bergabung dalam program BUMDes, dan masyarakat yang sudah lama menetap di desa Hilisalo'o. Dalam penelitian ini peneliti menentukan jumlah sebanyak 5 (lima) orang informan yang dapat memberikan informasi yang berbeda.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu di Desa Hilisalo'o. Pada penelitian ini, sumber data primer ini diperoleh dari kepala desa ataupun staf desa dan masyarakat melalui observasi, wawancara untuk menunjang keakuratan data mengenai pengembangan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Hilisalo'o.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data primer biasanya diambil melalui dokumen atau keseluruhan dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan dan sumber data lain yang berkaitan erat dengan pokok penelitian penulis.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada penelitian ini dengan tepat dan akurat. Faktor penting dalam penelitian adalah data, untuk itu diperlukan metode tertentu dalam pengumpulan data. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara, catatan lapangan, rekaman, dokumen, dan lain-lain (Creswell, 2016:267). Agar penelitian ini dapat terstruktur dengan baik maka dalam pengambilan data diperlukan metode yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi

1. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tempat peneliti melakukan penelitian. Dengan melakukan observasi ke lapangan secara langsung maka akan banyak mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang akan menjadi data dari penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan penerapan BUMDes dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Hilisalo'o.

2. Wawancara

Metode Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat mengumpulkan data penelitian. Data yang berasal dari hasil wawancara akan dapat diolah untuk data penelitian yang sedang diteliti. Metode wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan yang sedang di mintai keterangan atas apa yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang mendapatkan informasi lewat fakta yang tersimpan. Melalui pengumpulan data ini maka dapat menggali informasi yang ada sebelumnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data menurut John W. Creswell, mendefinisikan Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang

berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Pendekatan diatas dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis berikut ini:

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan, transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

Langkah 3. Memulai coding semua data. Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Langkah ini Validasi Akurasi Informasi Tema Deskripsi Memberi Kode Data (Tulisan tangan atau computer) Membaca seluruh data Menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis Data Mentah (transkrip, catatan lapangan, gambar, dan sebagainya) melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

Langkah 4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam ranah tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif.

Langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis.

Langkah 6. Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri La Suhu, M. Djae, dan Sosoda. (2020). *Analisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan*. Jurnal Government of Archipelago Jgoa Vol. 1 Nomor 1 Maret 2020.
- John W. Creswell *“Research Desing Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed”*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013.
- Jusman Iskandar, Engkus, Fadjar Tri Sakti, Nabilah Azzahra, dan Novianti Nabila. (2021). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 2021
- Moleong, Lexy. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke 32, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nining Asniar Ridzal, Waode Adriani Hasan (2020) *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri Vol. 4 No. 1 April 2020.
- Rahmawati Sururama, Andy Ariskha Masdar (2020) *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat*. Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2 No. 1, April 2020.
- Rosni, (2017) *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. Jurnal Geografi, vol 9, no.1-2017.
- Permendesa No. 4 Tahun 2015 *tentang Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa*
- UU No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- UU No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- UU No. 11 pasal 3 Tahun 2009 *tentang tujuan kesejahteraan*
- UU No. 39 Tahun 2010 *peraturan menteri dalam negeri tentang kepemilikan modal dan pengelolaanya*.

